

**PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)*

*Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Ahli Madya*



**Oleh :**

**DELVI SUSANTI**

**20133021/2020**

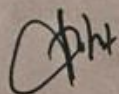
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2023**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
**PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BADAN**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI**  
**SUMATERA BARAT**

Nama : Delvi Susanti  
NIM : 20133021  
Program Studi : DIII Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Padang, Oktober 2023

Diketahui,  
Koordinator Prodi DIII  
Akuntansi



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc  
NIP. 198401132009122005

Disetujui Oleh,  
Pembimbing Tugas Akhir



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc  
NIP. 198401132009122005

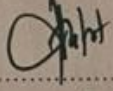
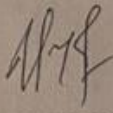
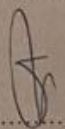
**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Delvi Susanti  
NIM : 20133021  
Program Studi : DIII Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program  
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Padang

Padang, Oktober 2023

Nama	Tim	Tanda Tangan
	Penguji	
Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	(Ketua)	1. 
Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	(Anggota)	2. 
Salma Taqwa, SE, M.Si	(Anggota)	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Delvi Susanti  
Thn. Masuk/NIM : 2020/20193021  
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi, 4 April 2002  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Keahlian : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Jl. Cendrawasih Gang Merpati No. 7, Air Tawar Barat, Padang Utara  
Judul Tugas Akhir : Proedur Penyusunan Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Oktober 2023

Yang menyatakan,



Delvi Susanti

NIM. 20133021

## **ABSTRAK**

### **PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA BARAT**

Delvi Susanti  
NIM: 20133021  
Universitas Negeri Padang

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Permendagri No 38 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan objek penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi, wawancara, dan mengumpulkan data-data tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam penyusunan anggaran di BPKAD Provinsi Sumatera Barat berjalan sesuai dengan Permendagri No 38 Tahun 2018.

Kata Kunci : Prosedur, Anggaran

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat ”**.

Tugas Akhir ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Akuntansi Diploma III (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi dalam menyusun Tugas Akhir ini.
2. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, Ayahanda Saiful, Ibunda Risyanti, Nenek Dahniar dan adik-adik Belinda Yulianti, Pioni Nurhaliza, Yuri Dwi Putri dan Yolanda, serta keluarga besar yang telah membantu memberikan doa, semangat, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

3. Teruntuk Da Engki, Ni Ria, Ni Mega, Ni Asri, Bg Andre Bg yogi dan Bayu terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kalian karena telah memberikan motivasi dan kekuatan untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini serta terimakasih juga atas pengiriman-pengiriman uang jajan setiap bulannya. Serta untuk anak tersayangku Ibnu, Zizi, Jena dan Hafiz.
4. Bapak Prof.Dr. Syamsul Amar B, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Helkadri Fitra, SE., MM, Ak, CA. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan arahan dan bimbingan dalam melanjutkan studi di Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Mayar Afriyenti SE, M.Sc selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan semangat, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulisan tugas akhir.
7. Ibu Mayar Afriyenti SE, M.Sc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta Pembimbing Tugas Akhir yang sangat berjasa membantu penulis dan menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta arahan yang sangat penulis butuhkan dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
8. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Kak Riva, Kak Utami, Kak Sonia, Kak Melin, Pak Im dan Bg iqbal selaku pembimbing di Badan Pengelolaan Keuagandan Aset Daerah (BPKAD)

Provinsi Sumatera Barat yang telah membimbing, memberikan masukan, serta ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis selama magang sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Karyawan / Karyawati Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah membimbing dan membantu penulis selama magang.
11. Kepada Rafi Eka Candra dengan nim 1811031005 yang selalu menjadi pendengar keluh kesah penulis makasih ayang.
12. Kepada teman-teman tercinta Dina, Ririn, Rani, Anissa, Iwen, Syifa, Lila, Laila, Ami, Eja, Wiri, Dion dan Rezi yang selalu memberikan semangat dan membantu meringankan beban pikiran disaat penulis mengalami *stuck* dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
13. Kepada Ailin dan Elsa yang juga sama-sama berjuang dengan Tugas Akhir serta memberikan semangat dan masukan.
14. Rekan- rekan seperjuangan Angkatan 20 Khususnya DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
15. *Last but not least*, untuk diriku sendiri yang sudah bersemangat dan berjuang dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. Delvi, kamu hebat!

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan.

Padang, Oktober 2023

Delvi Susanti

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	4
3. Tujuan Penelitian.....	4
4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II <u>T</u> INJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Anggaran .....	7
2.2 Jenis – jenis Anggaran.....	9
2.3 Sistematika Anggaran.....	10
2.4 Proses Penyusunan Anggaran.....	11
2.5 Prosedur Penyusunan Anggaran BPKAD Provinsi Sumatera Barat.....	15
2.7 Tujuan Penyusunan Anggaran.....	19
2.8 Pentingnya Anggaran .....	20
2.9 Kelemahan Anggaran .....	20
2.10 Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran .....	21
2.11 Pendekatan Penyusunan Anggaran.....	22
2.12 Landasan Hukum Penyusunan Anggaran.....	24
BAB III <u>P</u> ENDEKATAN PENELITIAN	26
A. Bentuk Penelitian .....	26
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	26
C. Rancangan Penelitian .....	27
1. Jenis dan Sumber Data.....	27
	vii
2. Tahapan Penelitian.....	28
3. Objek Penelitian.....	29

4.	Teknik Pengumpulan Data.....	29
5.	Teknik Analisis Data .....	30
BAB IV PEMBAHASAN		31
A.	Gambaran Umum Instansi.....	31
a.	Sejarah Singkat BPKAD Provinsi Sumatera Barat.....	31
b.	Visi dan Misi BPKAD Provinsi Sumatera Barat .....	32
c.	Struktur BPKAD Provinsi Sumatera Barat.....	33
d.	Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Barat .....	34
B.	Pembahasan .....	41
1.	Prosedur Penyusunan Anggaran .....	41
2.	Prosedur Penyusunan Anggaran Pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat	42
2.1	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .....	43
2.2	Kebijakan Umum Anggaran (KUA) .....	45
2.3	Prioritas dan Plofon Anggaran Sementara (PPAS).....	46
2.4	Rencana Kerja dan Anggara (RKA-SKPD).....	47
2.5	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) .....	48
3.	Tahapan dan Jadwal Prosedur Penyusunan Anggaran .....	49
4.	Hambatan Dalam Proses Penyusunan Anggaran.....	50
BAB V PENUTUP		53
A.	Kesimpulan.....	53
B.	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		55

## **DAFTAR TABEL**

4.1 Tahapan dan jadwal penyusunan anggaran .....	50
--	----

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Prosedur penyusunan anggaran.....	13
1.2	Prosedur penyusunan anggaran BPKAD Provinsi .....	15
4.1	Struktur organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Barat .....	35
4.2	Prosedur penyusunan anggaran BPKAD Provinsi Sumatera Barat...	44

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralisasi, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Pemerintah melaksanakan pembangunan atas kehendak rakyat yang di representasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya secara hati-hati adalah penyusunan RAPBD. RAPBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah baik rutin maupun pembangunan yang diukur dan diperhitungkan dengan uang. (Basri, 2013)

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Sejalan dengan pendapat diatas, juga mengemukakan bahwa, dengan berpedomaan pada prinsip-prinsip penganggaran dan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil

yang diharapkan, maka belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan (Bastian, 2011).

Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Dan juga anggaran memberikan gambaran kepada manajemen tentang sumber daya yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dalam anggaran. Sedangkan anggaran pada sektor publik memberikan gambaran mengenai rencana tentang berapakah dana yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat dan cara yang bagaimana yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang sehingga bisa mendanai rencana yang telah dibuat tersebut (Riska Korompat, 2015).

Sistem penyusunan anggaran yang baik tentu akan menghasilkan anggaran yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat. Proses penyusunan anggaran baik itu APBD maupun APBN seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat, bahkan APBD atau APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri

maupun oleh pihak oposisi. Maka dari itu, tahapan penyusunan anggaran merupakan tahapan yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategik, sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi. Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Namun demikian, tahap persiapan atau penyusunan anggaran harus diakui memang hanyalah salah satu tahap penting dalam keseluruhan siklus/proses penyusunan anggaran daerah tersebut. (Hadiwijoyo, 2019)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat dimana anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Suatu tantangan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat memenuhi kewajiban dalam hal penyusunan anggaran yang baik dan benar. sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang melatar belakangi penulis untuk

mengangkat judul ini yaitu ditahun 2021 anggaran di BPKAD ini tidak sesuai dengan realisasinya hal ini dibuktikan pada realisasi anggaran ditahun 2021 dimana realisasi sebesar Rp1.695.561.745.050 sedangkan anggaran Rp1.647.961.370.589 terdapat selisih sebesar Rp47.600.374.461 karna lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu lama menimbulkan keterlambatan pada pengesahannya sehingga target realisasi anggaran tidak tercapai seperti tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana proses penyusunan anggaran di BPKAD Provinsi Sumatera Barat apakah sudah sesuai dengan Permendagri yang berlaku.

Berdasarkan gambaran diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan mengetahui tentang bagaimana prosedur penyusunan anggaran agar dapat menghasilkan hasil yang lebih baik untuk kedepannya dan sebagai alat ukur dari tingkat kesuksesan dari suatu instansi pemerintah, untuk itu penulis mengangkat judul tugas akhir “Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah “Bagaimana Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat”

### **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, adapun tujuan penulis untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

### **4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang penulis lakukan di Badan Pengelola dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, instansi dan pihak lain yang membaca hasil penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Setelah melakukan penelitian ini, penulis dapat mengetahui bagaimana penyusunan laporan Relisasi Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Barat.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a) Bagi Penulis**

1. Sebagai sarana latihan membandingkan materi selama di perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan pada BPKAD Sumatera Barat.
2. Menambah wawasan tentang cara bagaimana prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban di BPKAD Sumatera Barat.

##### **b) Bagi Instansi**

Sarana untuk menjembatani antara instansi dengan lembaga pendidikan untuk bekerja sama.

##### **c) Bagi Pihak lain**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan penulisan yang berhubungan dengan laporan keuangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis bahas diatas mengenai Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu: Prosedur penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat mengacu dan berpedoman kepada Permendagri no 38 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah serta mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan setiap tahun dalam penyusunan anggaran semua program atau rencana yang telah disusun dalam perencanaan. .

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis yang berkaitan dengan Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam proses penyusunan anggaran pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat dapat tetap mengacu dan berpedoman sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sebagaimana telah berlaku.
2. Diharapkan anggaran di BPKAD sesuai dengan realisasi dimana perencanaan harus sesuai dengan analisis yang mendalam tentang kebutuhan dan prioritas masyarakat. Program dan proyek yang dianggarkan haruslah sesuai dengan tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, R. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM - Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA Vol. 1 No 4*, 202-212.
- Bastian, I. (2011). *Anggaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Deddi Nordiawan, A. H. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salamba Empat.
- Dharmanegara, I. B. (2010). *Penganggaran Perusahaan Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadiwijoyo, S. S. (2019). *Sistem Perencanaan dan Penggaran Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2010). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPF.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Rachman, S. R. (2013). *Anggaran*. Jakarta : Salemba Empat.
- Riska Korompat, A. T. (2015). Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kota Mabagu Tahun Anggaran 2014. *Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1*, 841-848.
- Rochmansjah, C. S. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Permendagri No 38 Tahun 2018 *Tentang Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah*
- Pasal 11 Ayat 2 *Tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah*
- Pasal 18 Ayat 1 *Tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Ploafon Annggaran Sementara (PPAS)*
- Pasal 8 Ayat 2 *Tentang Rencana Kerja Anggaran (RKA)*
- Pasal 2 Ayat 1 *Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)*